

BAB II

GENEALOGI BERKEMBANGNYA ISLAMOFOBIA DI PERANCIS

Eropa telah lama menjadi tujuan imigran dimulai jauh sebelum Perang Dunia berlangsung dan berkembang hingga kini. Motif ekonomi menjadi alasan utama imigran berbondong-bondong memasuki wilayah Eropa. Berbagai negara terdampak imigran seperti Perancis, Jerman dan Inggris mengalami dinamika baik sosial, ekonomi, maupun politik. Perancis khususnya, mengalami dinamika sosial dan politik yang sangat tajam khususnya antara warga Perancis dan imigran Muslim.

Bab ini akan mendeskripsikan secara komprehensif dinamika disertai dampak datangnya imigran ke Perancis. Bagian pertama bab ini akan menjelaskan secara historis kemunculan imigran di Perancis beserta dampak membanjirnya imigran berupa Islamofobia. Dalam bagian pertama, akan dianalisis faktor pendorong datangnya imigran ke Perancis disertai dengan perkembangannya hingga saat ini yaitu membanjirnya imigran di Perancis. Sedangkan bagian kedua bab ini akan dianalisis kemunculan Islamofobia di Perancis. Penulis akan menganalisis secara deskriptif konflik yang muncul antara warga Perancis dengan imigran sehingga menimbulkan sentimen yang muncul terhadap imigran khususnya imigran Muslim atau yang disebut dengan Islamofobia. Selain konflik horizontal dalam domestik Perancis, penulis akan menjelaskan faktor eksternal sebagai tonggak maraknya Islamofobia sekaligus faktor pendorong Islamofobia berkembang di Perancis. Bab ini berargumen bahwa kebijakan Eropa terhadap imigran tidak serta merta menurunkan tingginya gelombang imigran ke kawasan Eropa, justru muncul Perancis sebagai negara terdampak imigran beserta permasalahan domestik di dalamnya. Persaingan ekonomi merupakan dorongan utama munculnya konflik sosial antar-imigran Muslim dan masyarakat Perancis yang berkembang pada tindakan diskriminasi, kekerasan, dan anti-imigran.

Islamofobia muncul sebagai konsekuensi atas ketakutan masyarakat Perancis akan eksistensi imigran Muslim di Perancis.

2.1 Dinamika Imigran Perancis

Uni Eropa sebagai salah satu regionalisme terbesar di dunia memiliki permasalahan pelik dalam menghadapi imigran. Tercatat Eropa merupakan kawasan penerima pengungsi terbesar kedua di dunia dengan jumlah mencapai 4,2 juta jiwa (UNHCR, 2016). Hal tersebut dikarenakan Uni Eropa menyepakati *Treaty of Rome* (1957) mengenai 'four freedom' yaitu kebebasan pergerakan modal, barang, jasa, dan manusia (*freedom of movement, freedom of capital, freedom of goods, and freedom of services*). *Freedom of movement* berisi kesepakatan secara bertahap untuk menghapuskan pemeriksaan di perbatasan dalam rangka menjamin pergerakan bebas manusia (Europa.eu, 2018). *Freedom of movement* yang pada mulanya bertujuan baik yaitu untuk meningkatkan perekonomian Eropa berubah menjadi bumerang. Kebijakan tersebut mulanya bertujuan meningkatkan jumlah tenaga kerja di kawasan Eropa. Awalnya, Eropa yang menghadapi kondisi kekurangan tenaga kerja mulai terbantu dengan kebijakan bebasnya keluar masuk imigran sesama negara Eropa. Namun, seiring perkembangannya *freedom of movement* turut dimanfaatkan imigran dari luar Eropa menetap di kawasan negara anggota Uni Eropa. Peristiwa tersebut merupakan awal mula permasalahan imigran di Eropa.

Sejarah datangnya imigran ke Eropa dibagi ke dalam tiga perodesasi; tahun 1950 hingga 1974, 1974 hingga 1980-an saat krisis minyak dunia, dan 1990 hingga sekarang (Mol dan Valk, 2016). Periode pertama, yaitu 1950-1974, setelah Perang Dunia II Eropa mengalami kenaikan produksi secara masif dalam rangka rekonstruksi ekonomi pasca perang. Pada era tersebut, Eropa berusaha menciptakan kualitas pendidikan yang baik untuk para pekerja. Akibat pekerja yang semakin terdidik maka memungkinkan penduduk Eropa mengalami mobilitas sosial dengan bekerja sebagai pekerja kerah putih (*white collar*). Untuk itu, pekerja lokal tidak lagi mampu mengisi lowongan pada pekerjaan kerah biru (*blue collar*). Kesempatan tersebut memungkinkan datangnya buruh dari negara-

negara sekitar Eropa seperti Turki, Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Dengan alasan kedekatan geografis dan dorongan faktor ekonomi menjadikan awal gelombang imigran terjadi di wilayah Eropa. Pada periode pertama ini, terjadi mutualisme ekonomi antara negara penerima imigran dan imigran dari berbagai negara. Selain faktor ekonomi, penghormatan Perancis terhadap hak asasi manusia khususnya hak sipil membuat sirkulasi imigran terus berkembang hingga imigrasi tumbuh dari 66.400 individu per tahun pada tahun 1946-1955 menjadi hampir 250 ribu pada tahun 1956-1967.

Periode kedua, antara tahun 1974 hingga 1980-an. Pada periode tersebut terjadi krisis minyak dunia yang berimbas secara langsung pada perekonomian Eropa. Krisis tersebut membuat Eropa mengalami restrukturisasi ekonomi yang berdampak pada pembatasan tenaga kerja. Banyak negara meminta penghentian permintaan tenaga kerja seperti Swiss pada 1972, Jerman pada 1973, dan Perancis pada 1974 (Boyle et al dalam Valk, 2016). Krisis ekonomi yang mengikuti guncangan harga minyak menyebabkan peningkatan pengangguran. Warga Perancis melihat imigran sebagai penyebab utama kurangnya kesempatan kerja, dan para politisi mulai bertindak untuk menghentikan imigrasi. Namun, alih-alih melakukan pembatasan tenaga kerja asing, negara-negara Eropa justru hanya mengubah kebijakan mengenai imigrasi dengan menetapkan visa dan izin bermukim. Akibatnya, imigran non-Eropa yang terlanjur menetap di Eropa membawa sanak keluarganya tinggal di Eropa dan terus beranak-pinak sehingga menambah populasi imigran. Kebijakan naturalisasi liberal dimanfaatkan keluarga imigran bermukim dan menetap di Perancis sebagai alasan melakukan reunifikasi keluarga. Pada periode ini, mulai muncul konflik sosial berupa xenofobia antara penduduk Eropa dan imigran karena terbatasnya kesempatan kerja yang memungkinkan adanya persaingan. Konflik sosial marak terjadi di masyarakat dengan seruan 'anti-asing' atau dikenal dengan xenofobia berwujud diskriminasi, intimidasi, hingga kekerasan (Mol dan Valk, 2016).

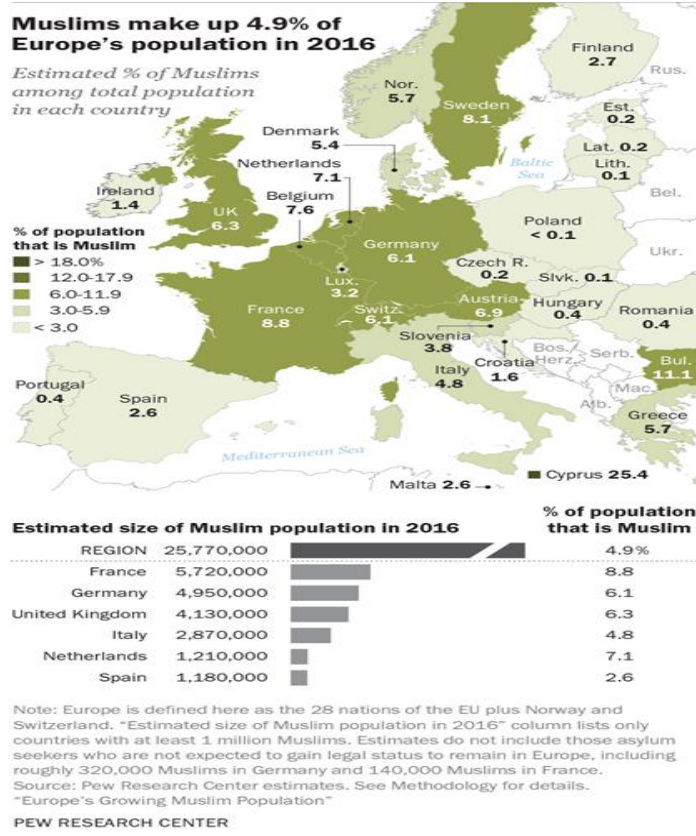
Periode ketiga, antara tahun 1990 hingga saat ini. Berakhirnya Perang Dingin diikuti selesainya konflik antara Eropa Timur dan Eropa Barat menjadi

tonggak meningkatnya kembali gelombang imigran ke Eropa. Perpecahan Uni Soviet dan berakhirnya konflik di Yugoslavia menyebabkan arus baru imigran ke sesama wilayah Eropa khususnya Eropa Timur ke Eropa Barat. Salah satu faktor utama terus meningkatnya imigran ke wilayah Eropa yaitu adanya konflik politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. *Arab Spring* membawa perubahan besar bagi negara-negara Timur Tengah yang diikuti dengan ketidakstabilan ekonomi, politik, maupun keamanan. Ketidakstabilan tersebut secara signifikan mempengaruhi migrasi, pencarian suaka, dan pergerakan manusia yang berkaitan erat dengan faktor kemiskinan dan pengangguran. Peristiwa *Arab Spring* menimbulkan gelombang tinggi pencari suaka yang datang ke Eropa untuk mendapat perlindungan dan kesejahteraan ekonomi. Tercatat akibat *Arab Spring*, negara terdampak yang berasal dari Suriah, Tunisia, Afganistan, dan Pakistan merupakan imigran terbesar yang datang ke Eropa. Persentasenya yaitu warga negara Tunisia menempati urutan pertama sebesar 20%, disusul Afganistan 16%, dan Pakistan 11% (Europa.eu, 2012). Selain Timur Tengah, Afrika juga merupakan penyumbang imigran dan pencari suaka terbesar ke Eropa. Kedekatan geografis menyebabkan mudahnya imigran datang ke wilayah Eropa terutama Italia, Malta, dan Spanyol melalui jalur laut. Rata-rata Eropa mendapat satu juta imigran asal Afrika pertahunnya. Menurut Peraturan Dublin II tahun 2003, negara pertama di mana pencari suaka mendarat sepenuhnya bertanggung jawab untuk memeriksa permohonan suaka orang tersebut (Cfr.org, 2007). Pada 2004 Uni Eropa telah memiliki kebijakan seleksi pencari suaka yakni dengan mengidentifikasi "*well-founded fear*" atau mengidentifikasi alasan pencari suaka harus berdasarkan konflik rasial, agama, dan kebangsaan sehingga mampu diberi akomodasi berupa pendidikan, perumahan, dan kesehatan (cfr.org, 2007). Kebijakan tersebut tidak serta-merta mengurangi volume imigran ke Eropa, justru akomodasi yang diberikan oleh negara-negara Uni Eropa menarik minat imigran terus berdatangan ke Eropa.

Jumlah imigran yang masuk ke kawasan Eropa pada tahun 2014 tercatat sejumlah 280.000 jiwa meningkat pada tahun 2015 sebesar 1,8 juta jiwa (BBC,

2016) dan data terbaru pada 2017 mencatat jumlah imigran non-Eropa saja mencapai 2,4 juta jiwa di kawasan Eropa (Eurostat, 2019). Tahun 2015 dikatakan sebagai tahun yang problematis bagi Eropa dikarenakan gelombang imigran yang tak henti mereda. Dimulai sejak peristiwa *Arab Spring* dan terus meningkatnya imigran asal Afrika menyebabkan Eropa di bawah Uni Eropa berpikir untuk mengkaji ulang kebijakannya terhadap imigran. Dilema melanda negara-negara Eropa mengenai keberadaan imigran. Negara-negara Eropa membutuhkan imigran sebagai tenaga kerja karena kurangnya populasi tenaga kerja usia produktif namun, di sisi lain persaingan menimbulkan konflik sosial yang muncul di kalangan masyarakat Eropa. Lebih jauh, konflik sosial mulai signifikan mempengaruhi kehidupan politik di negara-negara terdampak imigran seperti Jerman, Inggris, Spanyol, Italia, dan Perancis.

Perancis merupakan negara keempat penerima imigran terbesar di Eropa setelah Jerman, Inggris, dan Spanyol. Pada 2017 saja, Perancis menerima imigran sebanyak 370.000 jiwa dengan presentase 45,3% adalah warga non-Eropa (Eurostat, 2019). Imigran Perancis mayoritas berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika yang beragama Islam antara lain Aljazair, Afganistan, Tunisia, Maroko, Suriah, dan Turki. Tak heran jika populasi Muslim di Perancis sebanyak 5,7 jiwa atau 8,8% dari seluruh populasi Perancis sehingga menempatkan Perancis sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak di Eropa (Pew Research Center, 2017). Faktor lain, keterlibatan dan keberpihakan Perancis pada konflik Suriah mengharuskan Perancis turut bertanggung jawab memberi bantuan kemanusiaan berupa pemberian suaka (France Diplomatie, 2019).



Sumber: Pew Research Center, 2017

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan Eropa terhadap imigran tidak serta merta menyurutkan datangnya imigran ke kawasan Eropa. Dapat dikatakan berbagai kebijakan yang diterapkan Eropa kepada imigran gagal dibuktikan dengan terus membanjirnya imigran datang dan menetap ke Eropa dari periode pertama hingga periode ketiga. Perancis sebagai negara terparah terdampak imigran mendapat konsekuensi negatif yaitu lonjakan populasi yang mendorong pada timbulnya permasalahan domestik dalam lingkup sosial, ekonomi, dan politik.

2.2 Islamofobia di Perancis

Fenomena Islamofobia di Perancis tidak serta-merta timbul di kalangan masyarakat Perancis. Terdapat berbagai faktor pemantik muncul dan berkembangnya Islamofobia yang diidentifikasi sebagai faktor internal dan faktor

eksternal. Dalam melakukan proses analisis fenomena Islamofobia di Perancis, diperlukan definisi Islamofobia itu sendiri. Penelitian ini menggunakan definisi Islamofobia yang dikemukakan oleh Chris Allen (2010) dalam bukunya berjudul “*Islamophobia*”. Allen mendefinisikan Islamofobia sebagai:

Sebuah ideologi yang mirip dengan teori, berfungsi dan bertujuan untuk melakukan diskriminasi setara rasisme dan fenomena serupa, menopang dan mengabadikan penilaian buruk terhadap Muslim dan Islam, yang berkaitan dengan bagaimana cara masyarakat bertindak, berinteraksi, dan merespon, serta membentuk dan menentukan pemahaman, persepsi dan sikap masyarakat dalam sebuah konsensus sosial yang menginformasikan serta memberi konstruksi pemikiran terhadap Muslim dan Islam sebagai bagian dari luar masyarakat (Allen, 2010).

Definisi tersebut menekankan pada persepsi dan perlakuan masyarakat terhadap kelompok yang mendefinisikan mereka sebagai Muslim dan Islam melalui atribut atau simbol ke-Islaman yang digunakannya. Persepsi tersebut dituangkan masyarakat melalui tindakan berupa diskriminasi dan kekerasan sebagai ekspresi kebencian dan ketakutan terhadap kelompok Muslim di Perancis.

Faktor internal munculnya Islamofobia berada dalam masyarakat Perancis itu sendiri. Perancis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di Eropa tidak luput dari maraknya fenomena Islamofobia berupa perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Islamofobia tumbuh dan berkembang tidak hanya pada ruang lingkup sosial masyarakat namun hingga ruang lingkup politik. Mulanya, imigran dan masyarakat Perancis mampu bersinergi secara mutualisme pada periode gelombang imigran pertama karena adanya rasa saling membutuhkan dalam bidang ekonomi. Namun, premis Islamofobia muncul setelah adanya fenomena Xenofobia pada periode gelombang imigran kedua—pasca krisis minyak global. Faktor ekonomi berupa persaingan memperoleh kesempatan kerja merupakan dorongan utama terjadinya konflik dalam masyarakat Perancis. Kesenjangan sosial yang timbul dalam kehidupan sosial Perancis membawa pada terciptanya perjuangan kelas atau ‘*social struggle*’ untuk memperoleh kesetaraan (Pfefferkorn, 2014). Perjuangan kelas tersebut yang kemudian menimbulkan gesekan antar-kelompok sosial di

Perancis karena menganggap pendatang tidak layak mendapatkan tempat yang setara dengan masyarakat asli Perancis. Perubahan persepsi mulai muncul pada era gelombang imigran kedua yaitu periode 1974 hingga 1990-an. Persepsi positif berubah negatif karena perbedaan latar belakang ekonomi dan budaya.

Konflik antara imigran Muslim dan masyarakat Perancis telah lama berlangsung khususnya antara masyarakat Perancis dan imigran asal Afrika. Mengingat, imigran negara Maghribi menempati urutan teratas populasi imigran Muslim di Perancis. Konflik sosial pertama diidentifikasi terjadi pada 22 Oktober 1989, konflik tersebut merupakan konflik terbuka pertama yang terjadi di Perancis. Ribuan Muslim menggelar demonstrasi di Paris untuk mendukung perempuan-perempuan Muslim yang dikeluarkan dari sekolah mereka karena mengenakan hijab. Tiga perempuan Muslim yang mengenakan hijab dikeluarkan dari sekolah mereka di Creil, sebelah utara Perancis dengan alasan menggunakan simbol keagamaan di lingkungan sekolah. Bahkan setelah peristiwa tersebut, pemerintah Perancis menetapkan aturan pelarangan tutup kepala di lingkungan sekolah (Viorst, 1996). Aturan tersebut menimbulkan kecemasan tersendiri bagi Muslim Perancis karena merasa budaya Islam tidak dapat bersinergi dengan kehidupan sosial Perancis. Tidak hanya itu, budaya dan tradisi keagamaan Muslim mengenai pemotongan hewan atau Idul Adha juga menjadi perdebatan dalam masyarakat Perancis. Perbedaan budaya menjadi perih utama konflik terus berkembang antara imigran Muslim dan masyarakat Perancis.

Rentetan peristiwa terorisme terjadi di Perancis dimulai sejak tahun 1995. Ledakan bom Juli hingga Oktober 1995 di Paris menelan banyak korban jiwa dan harta benda. Tercatat terjadi delapan kali rentetan pengeboman sejak bulan Juli hingga Oktober 1995. *Armed Islamic Group (GIA)* atau gerakan ekstremis Islam Aljazair bertanggung jawab atas peristiwa terorisme tersebut. GIA merencanakan aksi terorisme pada malam tahun baru di Pasar Natal Strasbourg pada tahun 2000. Bahkan, GIA juga akan melakukan peledakan pada pesawat tujuan Paris-Miami pada Desember 2001 (Guardian, 2004). Beruntung, aksi terorisme tersebut berhasil dicegah oleh kepolisian Perancis. Hubungan politik antara Perancis dan Aljazair

menjadi motif utama masyarakat Aljazair melakukan protes dengan aksi terorisme. Tidak tinggal diam, pemerintah Perancis merespons dengan melarang lima majalah Islam dan menarik bantuan keuangan ke masjid di Paris (BBC, 1995). Aksi terorisme terus saja terjadi, dilakukan oleh Mohammed Merah yang mengaku sebagai anggota Al Qaeda yang melakukan jihad dengan cara menembak non-Muslim. Penembakan terjadi pada 2012 di dua kota yaitu Toulouse dan Montauban menargetkan tentara dan orang-orang Yahudi. Penembakan tersebut menimbulkan tujuh orang meninggal termasuk anak-anak (CNN, 2012).

Peristiwa penembakan yang mendapat begitu banyak perhatian dunia internasional yaitu pada 2015. Dua peristiwa terorisme terbesar terjadi di Paris yakni penembakan Charlie Hebdo dan Penyerangan Paris (*Paris Attack*). Januari 2015 penembakan terjadi di kantor majalah Charlie Hebdo, Paris. Rentetan peristiwa teror tersebut terjadi selama tiga hari dan tiga tempat berbeda yakni pada 7 hingga 9 Januari 2015. Total korban jiwa mencapai 17 orang. Diidentifikasi pelaku teror merupakan keturunan Aljazair dan anggota ISIS dan Al Qaeda. Beberapa bulan setelahnya, terjadi peristiwa *Paris Attack* pada November 2015 di enam tempat berbeda yaitu stadium Stade de France, rumah makan La Petit Cambodge Le Carillon, kafe Café Bonne Biere, rumah makan La Belle Equipe, rumah makan Comptoir Voltaire, dan teater Bataclan. Penembakan dan pengeboman dilakukan pada waktu yang bersamaan di keenam tempat tersebut. Setidaknya 130 orang meninggal dan korban luka sebanyak 494 orang. Sembilan orang bertanggung jawab atas peristiwa teror tersebut dan diidentifikasi kesembilan orang merupakan anggota ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) (CNN, 2018). Setelah teror hebat di sepanjang tahun 2015, aksi terorisme tak henti-hentinya melanda Perancis. Setelah 2015 tercatat sekurang-kurangnya 13 aksi terorisme berupa penembakan, pengeboman, dan penusukan terjadi di Perancis (Straits Times, 2018).

Berbagai peristiwa teror tersebut seakan menjustifikasi bahwa Islam merupakan agama yang membawa kekacauan dan kekerasan sehingga kewaspadaan muncul terhadap segala identitas ke-Islaman yang dimiliki seseorang seperti penggunaan hijab, burqa, niqab, dan lain-lain. Imigran Muslim yang memiliki

perbedaan identitas disertai atribut ke-Islaman mendapat konsekuensi atas ketakutan masyarakat Perancis. Islamofobia merupakan konsekuensi yang ditimbulkan akibat serangkaian teror yang bertubi-tubi melanda Perancis. Tidak tinggal diam, masyarakat perancis melakukan berbagai aksi simpati dan solidaritas dengan melakukan *long march* setelah peristiwa Charlie Hebdo sembari mengusung tagar '*I am Charlie*'. Selain itu, organisasi anti-Islam turut melakukan demonstrasi dengan menyerukan gerakan 'anti-Islam' dan 'anti imigran'. Organisasi seperti PEGIDA yang berasal dari Jerman berkembang hingga Perancis menyerukan gerakan anti-Muslim. Selain itu, partai sayap kanan atau *far-right National Front* dengan keras menyerukan gerakan anti-Islam dan anti-imigran menanggapi beragam teror yang terjadi atas nama pembelaan terhadap Islam. Gerakan '*We Don't Want You Here*' atau kami tidak menginginkanmu di sini mendapat banyak simpati dari masyarakat Perancis (New York Times, 2015).

Faktor eksternal diidentifikasi muncul dari luar wilayah Perancis sebagai pemantik Islamofobia marak terjadi dalam lingkup domestik Perancis. Peristiwa teror 11 September 2001 (9/11) yang melanda Amerika Serikat seakan menjadi sejarah marginalisasi Islam dan masyarakat Muslim dunia. Peristiwa terorisme yang menyerang gedung *World Trade Center* (WTC) memakan sekitar 3.000 jiwa dan berhasil diidentifikasi bahwa kelompok radikal Islam Al Qaeda yang bertanggung jawab terhadap aksi teror tersebut (911memorial, 2016). Peristiwa tersebut tidak hanya berdampak pada lingkup domestik Amerika Serikat saja namun meluas hingga ke seluruh penjuru dunia. Terlebih, pidato George W. Bush "*You're either with us or against us in the fight against terror*" (CNN, 2001) merupakan sinyal gerakan stigmatisasi Islam secara serentak. Hal tersebut tidak hanya merugikan umat Muslim di Amerika Serikat namun seluruh umat Muslim dunia. Ketakutan masyarakat dunia akan terulangnya kembali peristiwa teror membuat kewaspadaan terhadap umat Muslim dan segala atribut ke-Islaman. Terlebih, di wilayah Eropa masyarakat Muslim merupakan kaum minoritas yang sebagian besar terdiri dari kelompok imigran. Ketakutan-ketakutan tersebut kemudian diidentifikasi sebagai tindakan anti-Islam atau Islamofobia yang berbentuk perlakuan diskriminatif,

intimidatif, hingga kekerasan. Badan HAM Uni Eropa, *European Union Agency for Fundamental Rights* mengidentifikasi diskriminasi terbesar pada 2017 di Eropa terjadi pada kelompok Muslim terkhusus kaum wanita yang dilakukan di ruang publik maupun lingkungan kerja (Fra, Eropa, 2018).

Islamofobia di Perancis tidak muncul begitu saja namun didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa persaingan kesempatan kerja disertai hubungan politik Perancis dengan negara konflik memerankan peran penting berkembangnya Islamofobia di wilayah domestik Perancis. Selain itu, peristiwa 9 September 2001 (9/11) diidentifikasi sebagai dorongan eksternal perubahan persepsi masyarakat Perancis terhadap imigran Muslim dan agama Islam. Kedua faktor tersebut mewujudkan perkembangan Islamofobia yang semakin marak di wilayah domestik Perancis berupa tindakan diskriminasi dan kekerasan.

2.3 Kesimpulan

Kebijakan Eropa terhadap imigran dinilai kurang memberi solusi pada permasalahan domestik yang muncul di negara-negara kawasan Eropa. Gelombang imigran yang terbagi dalam tiga periodisasi waktu yaitu pada tahun 1950 hingga 1974, 1974 hingga 1980-an saat krisis minyak dunia, dan 1990 hingga sekarang merupakan bukti bahwa imigran tak henti membanjiri kawasan Eropa khususnya imigran asal negara Muslim. Justru muncul Perancis sebagai negara terdampak imigran yang menimbulkan permasalahan domestik cukup pelik. Dominasi dan eksistensi imigran Muslim di Perancis cukup mengkhawatirkan masyarakat asli Perancis khususnya eksistensi imigran Muslim dalam bidang ekonomi. Persaingan kesempatan kerja merupakan perih utama munculnya konflik sosial berupa diskriminasi dan ketakutan terhadap masyarakat asing atau dikenal dengan Xenofobia. Xenofobia berkembang dikarenakan faktor internal yang muncul dari dalam lingkungan Perancis itu sendiri salah satunya keterlibatan politik Perancis dengan negara-negara konflik di Timur Tengah. Serangkaian peristiwa teror yang melanda Perancis sejak 1995 hingga saat ini turut serta mengembangkan ketakutan masyarakat Perancis terhadap atribut ke-Islaman yang dimiliki imigran Muslim. Terlebih, setelah peristiwa teror 9/11 di Amerika Serikat, masyarakat Perancis

semakin menginginkan imigran Muslim meninggalkan wilayah Perancis karena rasa takut akan hal-hal yang berkaitan dengan Islam atau dikenal dengan Islamofobia. Islamofobia muncul dan berkembang di Perancis dengan wujud tindakan pencemaran, diskriminasi, hingga kekerasan terhadap imigran Muslim hingga kebijakan diskriminatif terhadap imigran khususnya imigran Muslim.

Kebijakan diskriminatif terhadap imigran khususnya imigran Muslim di Perancis muncul akibat peran serta kelompok sosial yang diidentifikasi sebagai kelompok penekan (*pressure group*) dan figur politik. Tanpa adanya peran aktif kedua tokoh tersebut Islamofobia hanya berkembang pada ruang lingkup horizontal masyarakat Perancis.